

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Keberadaan DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah haruslah mampu menciptakan *check and balances* disamping melalui fungsi anggaran yaitu dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga melalui fungsi legislasi dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,

dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar dalam Pengelolaan Keuangan Negara maupun Daerah.

Keberhasilan dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah tidak lepas dari faktor kepemimpinan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah melalui kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan motivasi. Kepemimpinan yang baik dapat memberikan motivasi serta dapat meningkatkan kinerja para karyawan atau bawahannya. Sebaliknya, kurangnya peranan kepemimpinan dalam suatu organisasi dapat menyebabkan turunnya motivasi dan kinerja karyawan itu sendiri. Kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi bawahannya untuk mencapai kinerja yang efisien dan memuaskan. Kepemimpinan merupakan peranan yang sangat penting dalam organisasi. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Perilaku para pemimpin itulah yang disebut dengan gaya kepemimpinan.

Sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui pencapaian organisasi atas tujuan dan misi organisasi/program. Selain itu, tujuan pengukuran kinerja adalah meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Sistem pengukuran kinerja dijabarkan dalam

indikator-indikator kinerja yang terdapat dalam desain pengukuran kinerja. Kawedar, dkk (2008), mengatakan bahwa kinerja yang dimaksud akan menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi unit kerja tersebut. Peningkatan kinerja didukung pula dengan adanya sistem manajemen yang terdesentralisasi dalam tubuh organisasi.

Ragamnya metode pengukuran kinerja tersebut menunjukkan kecenderungan perhatian yang tinggi terhadap peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian penerapan metode-metode tersebut harus mengakomodasikan lingkungan pemerintah daerah, agar mendapatkan hasil yang memiliki validitas tinggi dan tidak terjadi kesalahan pengukuran kinerja. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Penelitian terdahulu berkaitan dengan kejelasan tujuan/sasaran yaitu penelitian Locke (1968), dalam Maryati (2012), menunjukkan hubungan

kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan dengan kinerja manajerial. Partisipasi dan kejelasan tujuan, selanjutnya, diketahui memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran para manajer. Tingkat kesulitan sasaran anggaran yang tinggi diketahui memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja para manajer. Pengaruh evaluasi anggaran dan umpan balik terhadap sikap dan kinerja para manajer, di sisi lain diketahui lemah atau tidak signifikan.

Penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kinerja dilakukan oleh Renata (2006). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pada tingkat relatif rendah, antara gaya kepemimpinan dan kualitas SDM secara sendiri-sendiri terhadap kinerja. Namun, terdapat pengaruh positif yang relatif sedang, antara gaya kepemimpinan dan kualitas SDM secara bersama-sama terhadap kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka alasan pemilihan topik dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian terdahulu sebagian besar lebih menekankan pada aspek kinerja organisasi secara umum. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melakukan analisis dengan menggunakan data kuantitatif dan mendeskripsikan pada pihak yang terkait di SKPD Provinsi DIY. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesesuaian kejelasan tujuan, gaya kepemimpinan dan kinerja

keuangan pemerintah memiliki pengaruh terhadap kinerja, khususnya pada SKPD Provinsi DIY.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Maryati (2012), yang berjudul "Pengaruh Kejelasan Tujuan, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja SKPD". Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada objek penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Provinsi Bengkulu, sedangkan objek penelitian ini dilakukan di Provinsi DIY.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD Provinsi DIY?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD Provinsi DIY?
3. Apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD Provinsi DIY?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji:

1. Pengaruh positif kejelasan tujuan terhadap kinerja SKPD Provinsi DIY.

2. Pengaruh positif gaya kepemimpinan terhadap kinerja SKPD Provinsi DIY.
3. Pengaruh positif kinerja keuangan terhadap kinerja SKPD Provinsi DIY.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada:

1. Organisasi sektor publik, khususnya SKPD Provinsi DIY yang terkait dengan penerapan manajemen berbasis kinerja, agar dapat meningkatkan kinerja organisasinya.
2. Akademisi, agar dapat menunjukkan suatu bukti empiris bahwa kejelasan sasaran, gaya kepemimpinan, dan sistem pengukuran berpengaruh terhadap kinerja kuantitas dan kualitas organisasi sektor publik

